



STRATEGI IMPLEMENTASI ADMINISTRATOR DALAM SCHOOL BUDGETING MANAGEMENT

Ammar Navy¹, Agus Fahmi²

Singhanakhon Wittayanusorn School, Thailand¹

Universitas Pendidikan Mandalika, Indonesia²

Email: ammarnavy8@gmail.com

Abstract: *The activity of allocating funds in the implementation of educational operations is a very complex activity, therefore it requires planned management by competent people. The purpose of this research is to understand and know about the implementation of administration in financial management and school financing. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting interviews with the source directly in depth. The results of the research obtained are the problems that often occur in education financing, including limited sources of funds, uneven education funds received from the government, lack of transparency in education financing in schools, and financing that is not managed properly which can be caused by less competent fund managers in schools. The importance of this research lies in the implementation of administrative administration in the financial field of education financing that must be considered by school principals to improve the quality of school administration.*

Keywords: *Administrative Implementation, School Budgeting Management*

Abstrak: Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami dan mengetahui tentang implementasi administrasi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan melakukan *interview* pada sumbernya langsung secara mendalam. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah adanya masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan antara lain sumber dana yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena kurang kompetennya pengelola dana di sekolah. Pentingnya penelitian ini terletak pada implementasi administrasi tata usaha dalam bidang keuangan pembiayaan pendidikan yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu tata usaha sekolah.

Kata Kunci: *Implementasi Admnistrasi, School Budgeting Management*

LATAR BELAKANG

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana prasarana pembelajaran.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas (matin, 2004 4). Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, oleh

karena itu dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan antara lain sumber dana yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena kurang kompetennya pengelola dana di sekolah. Tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain hal itu dapat dilihat dari sarana prasarana dan kualitas peserta didiknya. Dari beberapa permasalahan dalam pembiayaan Pendidikan tersebut hendaknya pemerintah mencari solusi solusi maupun tindakan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Anggaran pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah hendaknya juga diperhatikan perkembangan masing-masing sekolah dari tahun ke tahun, sehingga sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana dan mutu yang baik lebih dikontrol pengembangannya agar dananya dapat dialihkan ke sekolah-sekolah yang belum memiliki mutu yang baik.

Pentingnya penelitian ini terletak pada implementasi administrasi tata usaha dalam bidang keuangan pembiayaan pendidikan yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu tata usaha sekolah. Pada akhirnya juga dapat mengelola pendidikan dan proses keuangan pembiayaan pendidikan yang baik serta menciptakan sekolah yang berkualitas dan memajukan sekolah itu sendiri, dan untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun yang akan datang, terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan keuangan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan baik itu keuangan pembiayaan rutin maupun keuangan pembiayaan pembangunan.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan Pendidikan terdiri dari dua kata yaitu “pembiayaan” dan “pendidikan”. Pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang artinya pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah menjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, Negara.

Pendidikan bersifat *budgetair dan nonbudgetair*. Biaya yang bersifat *budgetair* merupakan biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah. Sedangkan biaya *nonbudgetair* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua peserta didik, maupun peserta didik itu sendiri. Sedangkan menurut Dadang Suhardan, dkk (2014: 22) biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan Nanang Fattah (2000; 23).

Menurut Matin (2014:8), biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali

dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas bahwa, biaya pendidikan adalah pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

1) Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan di Indonesia antara lain diatur dalam:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa: dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. Nanang Fattah (2004:113) menjelaskan bahwa sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua murid (BIP3), dan masyarakat. Penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat terdiri dari gaji, subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan SDN (SBPP-SDN), Dana Operasional Perawatan (DOP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa: pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 48 Tahun tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 juga menyebutkan bahwa: pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Menurut Matin (2014: 55), untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, para administrasi dan manajer pendidikan harus memahami dan menguasai sistem penganggaran yang berlaku di suatu negara. Ada enam sistem penganggaran pendidikan yang dikenal dan dianut oleh suatu negara yaitu:

a) *Line Item Budgeting* (LIB)

LIB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada jenis barang yang diperlukan.

b) *Capital Budgeting* (CAB)

CAB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada jangka waktu yang lama. Sistem penganggaran CAB bersifat investasi jangka panjang dan merupakan sistem pengalokasian anggaran untuk biaya modal atau biaya pembangunan.

c) *Performance Budgeting* (PEB)

PEB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi selain pada jenis barang yang diperlukan, dan pada jangka waktu yang lebih lama, juga berorientasi kepada keluaran.

d) *Program Budgeting* (PROB)

PROB ialah sistem penganggaran pendidikan yang dilaksanakan untuk menghindari terjadinya publikasi pelayanan pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada unit yang berbeda.

e) *Planning Programming and Budgeting System* (PPBS)

PPBS adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada mutu keluaran, dimana anggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program pendidikan yang diusulkan.

f) *Zero Base Budgeting* (ZBB)

ZBB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada kepada keterbatasan sumber dana.

Menurut Matin (2014: 92) perencanaan pelaksanaan anggaran pada hakikatnya merupakan kegiatan penyesuaian anggaran dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan pada anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.

a) Anggaran Rutin

Anggaran rutin pendidikan terdiri dari atas tiga sektor yang masing-masing sektor dijabarkan dalam lima bagian yaitu subsector, program, kegiatan, jenis anggaran, dan mata anggaran.

b) Anggaran Pembangunan

Anggaran Pembangunan bidang pendidikan yang tuangkan dalam rencana lima tahunan terdiri atas 4 sektor. Setiap sektor dirinci ke dalam subsektor dan program, Yang seluruhnya berjumlah 7 sektor dan 21 program.

Dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan terlebih dahulu yang menetapkan besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program, dibutuhkan informasi tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besar anggaran suatu program juga ditentukan dengan adanya upaya untuk mempercepat penyelesaian setiap pekerjaan dalam program tersebut. Misalnya dalam kontrak yang sudah ditandatangani, karena alasan yang dipertanggungjawabkan mungkin saja dipercepat waktu penyelesaiannya atau sering disebut *cash program*.

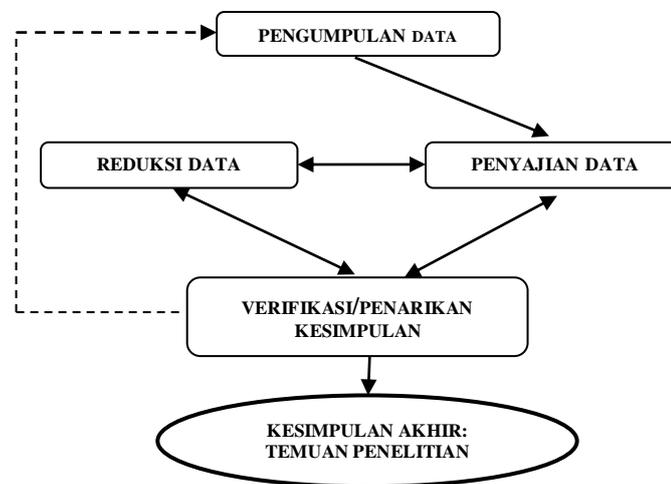
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *study descriptive* yang temuan-temuan penelitiannya terungkap

dengan pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kasetvideo, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data pada masing-masing subyek yaitu, pengelolaan administrasi perguruan tinggi berbasis Electronic Records. Menurut Nasution (1988), mengatakan bahwa karena ada data kualitatif terdiri dari kata-kata dan bukan angka-angka yang dideskripsikan memerlukan interpretasi guna diketahui makna dari data tersebut maka penganalisisan yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti dua modus yang dianjurkan Bogdan & Biklen (1982) yaitu proses analisis data dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data, analisis setelah pengumpulan data selesai.

Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar: Pola Interaktif Analisis Data Penelitian
(Diadopsi dari Miles & Huberman, 1984:23)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi administrasi tata usaha memiliki langkah perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan sistematis dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan dikemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam manajemen tenaga kependidikan, pengorganisasian sangat dibutuhkan guna mengatur tenaga tata usaha dengan cara menempatkan tenaga tata usaha agar bekerja sesuai dengan tugas dan kemampuan yang dimilikinya guna menciptakan tenaga tata usaha yang professional.

Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Besarnya dana yang diterima sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan.

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan maka terlebih dahulu ada tahap perencanaan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dapat menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan untuk mengetahui sumber dana, jumlah dana, dan program dan kegiatan yang dibiayai. Perencanaan pembiayaan di sekolah terlebih dahulu menyusun rencana jangka menengah dalam kurun waktu empat tahun. Dari perencanaan jangka menengah akan dijabarkan ke Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan kemudian akan terperinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAS).

b. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah

Setelah terbentuknya RKAS BOS, yang memuat program-program dan kegiatan yang dibiayai, serta penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, maka perlu pengawasan lebih lanjut untuk mengontrol pengeluaran dana BOS. Dalam hal mengatur segala jenis penerimaan dan pengeluaran anggaran BOS yang bertanggung jawab penuh yakni Bendahara BOS. Konsep pengawasan anggaran yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Artinya rencana anggaran yang telah ditetapkan pada awalnya sesuai atau tidak dengan pengalokasian anggaran yang dikeluarkan. Seperti yang ditegaskan oleh Nanang Fattah (2004).

Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia”. Pengalokasian atau distribusi anggaran pendidikan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang digunakan dalam pendidikan di sekolah (Depdiknas: 2009).

Menurut Matin (2014:119-120), dalam rangka pengalokasian anggaran pendidikan ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu menginventarisasikan sumber dana pendidikan dan menentukan skala prioritas. Dalam rangka pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam dokumen RKAS tercantum semua program dan kegiatan beserta besaran realisasinya dalam kurun waktu satu tahun pelajaran. Adapun pembiayaan yang ada di sekolah akan digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan demi meningkatkan mutu sekolah. Sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS maupun dana BPP, maka pengelola keuangan sekolah dalam hal itu Bendahara BOS dan Bendahara BPP mengimplementasikannya ke dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang memuat pada delapan Standar Nasional Pendidikan.

KESIMPULAN

School Budgeting merupakan hal pokok dalam menentukan program dan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah pada periode tertentu. Dalam pelaksanaan anggaran pendidikan, terlebih dahulu menetapkan besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program.



Kemudian dibutuhkan informasi tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besar anggaran suatu program juga ditentukan dengan adanya upaya untuk mempercepat penyelesaian setiap pekerjaan dalam program tersebut. Misalnya dalam kontrak yang sudah ditandatangani, karena alasan yang dipertanggungjawabkan mungkin saja dipercepat waktu penyelesaiannya atau sering disebut *cash program*. Pada pelaksanaan school budgeting harus memperhatikan dua hal, yaitu perencanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan di sekolah terlebih dahulu menyusun rencana jangka menengah dalam kurun waktu empat tahun. Dari perencanaan jangka menengah akan dijabarkan ke Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan kemudian akan terperinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAS). pengeluaran anggaran BOS yang bertanggung jawab penuh yakni Bendahara BOS. Konsep pengawasan anggaran yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardan, H. Dadang, Ridwan, dan Enas. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Arsanti, milen.2021. "Meski 20 Persen APBN, Belum Cukup Biayai Pendidikan Di Indonesia" <https://siedoo.com/berita-35277-meski-20-persen-apbn-belum-cukup-biyai-pendidikan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 08 Maret 2022, Pukul 19:14 Wita
- Asmendri. (2012). *Teori dan Aplikasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah dan Madrasah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Burhanuddin, Y. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fattah, Nanang. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Imam Machali & Ara Hidayat. (2016). *The Handbook Of Education Management Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Inseight Talenta. *Pengertian dan fungsi manajemen*. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/pengertian-manajemen/>. Diakses tanggal 25 Februari 2022, pukul 16:42 Wita
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karno, E. 2016. *Pemerintah Responsif Pendidikan*. Shautut Trabiyah. Vol. 18-38
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Minarti, Sri, 2011. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruza Media
- Mustfah, jejen. (2015). *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Prenamedia Group
- Putera, nusa. (2012). *Penelitian Kualitatif & Aplikasinya*. Jakarta: PT Indeks.
- Saifudin, ahmad. (2017). "Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Perspektif Islam (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama Global Madani Bnadar Lampung)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- http://repository.radenintan.ac.id/1869/1/SKRIPSI_MUHAMMAD.pdf. Diakses tanggal 22 Februari 2022, Pukul 18:24 Wita



- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan(Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta:Alfabeta.
- Suhardan,Dadang, dkk.(2014). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.
- Suparlan.2013. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Dari Teori Sampai Praktik*. Jakarta: Bumi Askara.
- Tinggogoy, Deiby Cristiana. 2019. *Ananlisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bos*. Jurnal Sosial dan Humanaira. Vol.68-67
- Usman,husaini.(2006). *Manajemen Teori,Praktik, dan Riset*. Jakarta:PT Bumi Askara
- W. Gulo. 2003. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Yuliani, hanifah.(2016).*Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri NgrojoNanggulan Kulon Progo*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta